



RENJA PERUBAHAN

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**20
25**



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.**

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

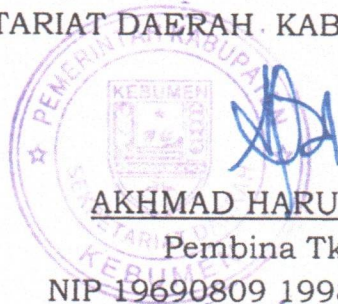
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP-19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja yang telah dilaksanakan hingga triwulan 1 (satu) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang disusun berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

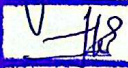
Sangat disadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja di masa mendatang sangat kami harapkan dari semua pihak.

Kebumen, 26 Juni 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN


TEGUH YULIONO, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP: 19787312005011006

TAMBAHAN KETERANGAN OLEH TIM BAPPERIDA	
NO	TANDA TANGAN
Krma Karmila, S.Sos.M.Eg.	
Rudi Jatmika	

DAFTAR ISI

JUDUL	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DATAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	iv
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	1
I.3. Maksud dan Tujuan	2
I.4. Sistematika Penulisan	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 TRIWULAN I	6
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	51
3.3. Program dan Kegiatan	56
IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
4.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan	59
4.2. Rencana Pendanaan Pengetasan Kemiskinan Ekstrem pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	63
V. PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1.	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaran Urusan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Triwulan I Tahun 2025	7
Tabel II.2.	Evaluasi Capaian Indilator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025	12
Tabel III.1	Keselaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2025	43
Tabel.III.2.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2025	44
Tabel III.3.	Keselaran Sasaran RPJMD, Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	45
Tabel III.4.	Keterkaitan Sasaran hingga Bidang/Program dan Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	46
Tabel III.5.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025	55
Tabel III.6.	Capaian Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Mencapai Sasaran Pokok Ketahanan Pangan Tahun 2025	55
Tabel IV.1	Kerangka Pendanaan pada RKPD Murni, APBD Murni, dan Perubahan RKPD Tahun 2025	62
Tabel IV.2	Rencana Pendanaan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	63

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 TRIWULAN I

Visi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen adalah yaitu: ***“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”***.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 2 (dua) yaitu: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

Dengan adanya perubahan kelembagaan mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan program, perubahan kegiatan dan perubahan target kinerja serta perubahan lokasi maupun penambahan kelompok sasaran kegiatan, tentunya perubahan – perubahan tersebut harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan berdasar hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama Perangkat daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja.

Hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggara Urusan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Triwulan I (Bulan Maret) Tahun sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Penyelenggara Urusan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Triwulan I Tahun 2025

Urusan/ Program	Indikator	Satuan	Triwulan I Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d Triwulan I 2025
			Target	Realisa si	Tingkat Capaian				
Pangan	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	5	4,52	90,40%	ST	6	75,33%	T
	Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2025				90,40%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d TW 1 2025	75,33%	T
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan	%	23,26	20,22	86,93%	T	24,78	81,60%	T
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan	%	50,32	48,38	96,14%	ST	52,70	91,80%	ST
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	%	61,83	58,78	95,07%	ST	64,12	91,67%	ST
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	93,53	92,63	99,04%	ST	95,29	97,21	ST
	Rata-rata Capaian Program RKPD 2025				94,30%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. TW 1 2025	90,57	ST
Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	5,00	14,33	100%	ST	6,00	100%	ST
	Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2025				100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. TW 1 2025	100%	ST
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	12,79	13,25	100%	ST	12,91	100%	ST
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	%	26	20,9	80,38%	T	28,00	74,64%	S

Urusan/ Program	Indikator	Satuan	Triwulan I Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d Triwulan I 2025
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	3,07	19,16	100%	ST	3,17	100%	ST
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian	%	10,59	1,54	14,54%	SR	11,18	13,77%	SR
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	%	100	100	100%	ST	100,00	100%	ST
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	%	59	58	98,31%	ST	60,00	96,67%	ST
	Rata-rata Capaian Program RKPD 2025				82,21%	T	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. TW 1 2025	80,85%	T

Sumber : Dokumen Perubahan RKPD 2025

Capaian kinerja yang menunjukkan urusan pangan dengan 1 indikator yaitu Persentase Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan telah mencapia status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dengan tingkat capaian 90,40%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026, tingkat capaian indikator urusan pangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah menvapai 75,33% dengan status predikat kinerja Tinggi (T).

Urusan pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan didukung melalui 4 program dengna 4 indikator, adapun rincian mengenai capaian kinerja pada 4 indikator tersebut, yaitu :

1. Persentase desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan, tingkat capaian telah mencapai 86,93% dengan predikat kinerja Tinggi (T). Permasalahan dalam pancapaian target diantaranya masih minimnya lumbung pangan di daerah serta pengelolaan dan keterlanjutan infrastuktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan oleh masyarakat yang belum optimal. Untuk itu, beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah dengan fasilitasi prasarana dan sarana lumbung pangan untuk masyarakat serta pembinaan pengelolaan dan keberlanjutan infrastruktur dan kemandirian pangan.
2. Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan, tingkat capaian kinerja sebesar 96,14% dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya belum mantapnya pengelilaan cadangan makanan masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyakata dalam konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), masih rendahnya diversifikasi pangan, masih tingginya makanan sisa/terbuang (*food waste*) serta masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan. Beberapa upaya yang dilakukan

diantaranya dengan memberikan informasi yang jelas tentang stok cadangan pangan serta mekanisme distribusinya kepada masyarakat serta melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat dengan diberi pemahaman tentang pentingnya cadangan makanan pribadi dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat serta melakukan sosialisasi dan pemanfaatan lahan pekarangan (P2L)

3. Persentase desa yang tertangani kerawanan pangannya tingkat capaian kinerja sebesar 95,07% atau mencapai status predikat Sangat Tinggi (ST). Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten yang belum mencukupi, peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan perlu diperbaharui serta terjadinya perubahan dan anomali iklim yang tidak menentu menyebabkan kemungkinan kerawanan pangan. Adapun upaya yang perlu dilakukan diantaranya dengan penyediaan Dana Talangan untuk masyarakat guna memperdayakan kelompok usaha pada desa rawan pangan serta pembuatan Peta Rawan Pangan yang berkelanjutan.
4. Persentase hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tingkat capaian kinerja sebesar 99,04% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), serta masih kurangnya pengetahuan sertifikasi hasil pertanian oleh masyarakat. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu pengoptimalan pengawasan dan sertifikasi hasil/produk pertanian serta pembinaan tentang pangan yang memenuhi B2SA.

Capaian kinerja urusan pertanian dengan 1 indikator yaitu Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian telah mencapai tingkat capaian 100%, dengan status predikat Sangat Tinggi (ST). Urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen didukung melalui 6 program dengan 6 indikator, adapun rincian mengenai capaian 6 indikator tersebut, yaitu

1. Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak, capaian kinerja sebesar 80,38% dengan status predikat kinerja Tinggi (T). Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya masih terjadinya alih fungsi lahan ke non pertanian sehingga ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang, minimnya rata-rata luas kepemilikan dan penguasaan lahan petani, kondisi jaringan irigasi belum optimal, kurang efektifnya pemanfaatan air irigasi. Beberapa upaya yang perlu dilakukan diantaranya optimalisasi peran aktif dari kelompok masyarakat (GP3A, P3A) dalam memelihara saluran irigasi, penerapan regulasi pemerintah terkait lahan pertanian berkelanjutan (LP2B), serta optimalisasi operasionalisasi, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi yang ada untuk memastikan distribusi air yang efisien dan merata.
2. Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Beberapa permasalahan yang masih terjadi diantaranya yaitu masih terbatasnya ketersediaan dan akses pupuk bersubsidi, penggunaan teknologi yang belum optimal. Adapun beberapa upaya yang diperlukan untuk

mengatasi permasalahan tersebut yaitu diperlukan adanya diversifikasi pupuk dengan mengembangkan alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan serta memberikan pelatihan tentang penggunaan pupuk organik kepada petani. Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi untuk memastikan bahwa pupuk tersebut sampai kepada petani yang membutuhkannya, Peningkatan teknologi pasca panen yaitu dengan meningkatkan akses petani terhadap teknologi pasca panen seperti pengeringan dan penyimpanan yang tepat guna mengurangi kerugian hasil panen. Memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pasca panen yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat dalam pengolahan dan penyimpanan;

3. Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Beberapa permasalahan yang masih terjadi diantaranya Produktivitas ternak Sapi Unggulan (Sapi PO Kebumen) terganggu akibat Penyakit Hewan Menular Strategis, Masih awamnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin penyakit hewan menular. Adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) yang menghambat proses pengambilan sampel pada ternak Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB). Belum optimalnya pengawasan lalu lintas ternak keluar masuk daerah yang berpotensi menyebabkan penularan penyakit hewan. Adapun beberapa upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu diperlukan adanya kedisiplinan Biosecurity, penanganan setiap penyakit hewan seperti pengobatan massal PMK dan LSD dengan Puskesmas, dan prosedur isolasi kasus. Peningkatan Pelayanan Medik Reproduksi bekerjasama dengan FKH UGM. Mengusulkan anggaran untuk Pelestarian Wilayah sumber Bibit dan Bibit Sapi PO Kebumen kepada Kementan serta peningkatan produktivitas Sapi PO Kebumen. Pelaksanaan vaksinasi PMK dan LSD dengan target minimal 80 persen dari populasi sapi. Surveilans/pengamatan penyakit hewan secara rutin.
4. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian capaian kinerja sebesar 14,54% dengan predikat Sangat Rendah (SR). Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu semakin beragamnya wabah penyakit akibat semakin terdegradasinya lingkungan serta pengaruh perubahan iklim. Upaya mengatasi permasalahan diantaranya yaitu dengan optimalisasi peran aktif penyuluh pertanian dalam mengedukasi para petani mengenai praktik pertanian yang baik untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit, termasuk rotasi tanaman dan kebersihan lahan, membangun sistem pemantauan dini berbasis teknologi untuk mendeteksi gejala awal hama dan penyakit, termasuk rotasi tanaman dan kebersihan lahan, membangun sistem pemantauan dini berbasis teknologi untuk mendeteksi gejala awal hama dan penyakit pada tanaman atau hewan sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih cepat, mendorong penggunaan biopestisida yang ramah lingkungan dan mengurangi risiko dampak negatif terhadap ekosistem dibandingkan pestisida kimia.

5. Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Beberapa permasalahan yang masih terjadi diantaranya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap izin usaha, dan ketersediaan data usaha pertanian dan peternakan yang belum optimal. Adapun upaya menangani permasalahan tersebut yaitu perlunya sosialisasi mengenai regulasi perizinan usaha baik pertanian maupun peternakan.
6. Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian dengan tingkat capaian sebesar 98,31% atau telah mencapai status predikat kinerja Saat Tinggi (ST). Permasalahan yang terjadi diantaranya masih rendahnya kapasitas SDM penyuluh terkait Kelembagaan Ekonomi Petani dan konsolidasi petani untuk berkorporasi. Upaya yang dilakukan diantaranya mengembangkan program magang dan pelatihan yang menarik dan praktis, dengan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pertanian modern dan berkelanjutan, menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis, seperti pengelolaan usaha pertanian pemasaran, dan manajemen, untuk meningkatkan daya saing petani dan peternak.

Evaluasi capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintan daerah	100	100	100	20.21	20.21	20.21
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	171	34	34	34	6	17.65
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.00	9	15	3	3	20
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125	25	20	3	3	15

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	60	12	12	6	3	25
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220	203	220	177	177	80.45
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130	12	22	4	4	18.18
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	12	3	3	3	1	33.33
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	3	4	1	1	25

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	3	3	25
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	12	12	3	3	25
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	255	4	0	0	0	0
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Ban Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	3	3	25
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	4	1	1	25

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Knerja s.d Tahun 2025 %)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Ban Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	4	12	3	3	25
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Ban/Material yang Disediakan	60	4	4	1	1	25
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	3	3	25
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	4	4	1	1	25
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	495	66	124	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	321	0	31	0	0	0
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78	15	11	0	0	0
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	208	8	15	0	0	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	3	3	25
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	4	1	1	25

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	3	3	25
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	3	3	25
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130	130	130	9	9	6.92
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelira dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	55	14	4	4	28.57

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelira	90	16	16	4	4	25
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelira/Direbilitasi	33	9	7	1	1	14.29
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	24.78	20.22	23.26	20.22	20.22	86.93
8	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	24.78	20.22	23.26	20.22	20.22	86.93

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Knerja s.d Tahun 2025 %)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0	0	4	1	1	25
C	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketanan Pangan	52.7	48.38	50.32	48.54	48.54	96.46
9	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	24.75	21.75	23.25	22.08	22.08	94.97

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
1	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	135	27	27	6	6	22.22
2	Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM	Informasi Neraca Ban Makanan (NBM)	20	4	4	1	1	25
10	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	10	14.16	10	10.29	10.29	102.9
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50	20	20	1	1	5

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
11	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	80.65	75	77.39	75	75	96.91
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	75	4	4	1	1	25
D	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangnya	64.12	58.78	61.83	58.78	58.78	95.07

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Knerja s.d Tahun 2025 %)
12	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Katanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	5	1	1	1	1	100
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	5	1	4	1	1	25
13	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	52	14	1	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52	16	4	1	1	25
E	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	95.29	92.63	93.53	94.29	94.29	100.81
14	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	5	1	1	1	1	100
1	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbun	0	0	4	1	1	25

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
2	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbun	0	0	4	1	1	25
F	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.91	7.48	12.79	0	0	0.00
15	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian	71	70.63	69	9	9	13.04
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2030	639	2	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Knerja s.d Tahun 2025 %)
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10	2	2	0	0	0
16	Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas area tanaman pertanian/perkebunan yang difasilitasi	0.59	0.12	0.79	0	0	0
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	929.6	3	3	0	0	0
2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	31	32	2	0	0	0
3	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	8	1	1	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
17	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	127.28	124.78	124.78	0	0	0
1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Ban Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12	20	1	0	0	0
18	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	100	100	10	0	0	0
1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	5	22.03	1	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
19	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	18.11	3.62	3.23	0	0	0
1	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	2500	0	1	0	0	0
2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	10000	0	1	0	0	0
G	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	28	20.9	26	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
20	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	10	2	2	0	0	0
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	10	2	1	0	0	0
2	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B yang dikelola	0	0	1	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
21	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	348	62	18	0	0	0
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	37	18	5	0	0	0
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelira	32	3	2	0	0	0
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	40	6	4	0	0	0
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	191	6	5	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
5	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2	1	2	0	0	0
22	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	26	26	26	6	6	23.07692308
1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	26	26	26	0	0	0
H	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	3.17	19.16	2.89	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
23	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	1681	1586	1736	434	434	25
1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	16000	1	1	0	0	0
24	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	16000	986	3200	800	800	25

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12000	7016	1	0	0	0
2	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	0	0	1	0	0	0
25	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	9050	38443.08	1810	5000	5000	276.24
1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1810	11040	1	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
26	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	12	12	12			0
1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	0	1	0	0	0
2	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	500	0	1	0	0	0
27	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang dibina terdapat penerapan kesejahteraan hewan	6	6	6	1	1	16.67

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
1	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usa yang dibina terdapat penerapan kesejahteraan hewan	6	0	4	0	0	0
I	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	11.18	1.01	10.59	0.16	0.16	1.51
28	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	9270	937.08	9900	150	150	1.52

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Knerja s.d Tahun 2025 %)
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbun (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	770	555	550	150	150	27.27
2	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	8500	2	2	0	0	0
J	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Izin Usa Pertanian	100	100	100	100	100	100
29	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	100	100	100	100	100	100

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usa Pertanian	100	100	100	100	100	100
30	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	100	100	100	100	100	100
1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usa Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliraan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	100	100	100	100	100	100

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 %)
K	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyulun Pertanian	60	58	59	50	50	84.75
31	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	3.2	2.8	3	2.8	2.8	93.33
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyulun Pertanian di dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	257	2.6	1	0	0	0
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150	5	1	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Knerja s.d Tahun 2025 %)
3	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	82	5	4	0	0	0
4	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0	0	128	128	128	100
5	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0	0	1	0	0	0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 118 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan, dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas dinas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
2. Perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Penyuluhan;
4. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Bidang Ketahanan Pangan; dan
8. UPT.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam

kurun waktu satu tahun berjalan baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah dilakukan penyesuaian agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Tindak lanjut dengan adanya Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 adalah tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan kemudian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 TRIWULAN I

Pada bagian ini terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Triwulan berdasarkan target indikator sasaran program dalam Renja, dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2025 yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2025

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Pada bagian ini terdiri dari Tujuan dan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen; Program dan Kegiatan

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Pada bagian ini berisi tentang rumusan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan perubahan pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai Perubahan penjabaran tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sedangkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Namun demikian sesuai arahan pada Musrenbang Nasional RKP Tahun 2025, beberapa indikator RKPD Tahun 2025 yang menjadi Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 untuk disesuaikan dengan data baseline tahun 2025. Sementara itu, berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2025 adalah “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang telah disusun diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

Prioritas pembangunan Nasional pada Tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan peneylundupan; serta

- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada:
- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025
- Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu:
- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
 - c. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - d. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
 - e. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat.
- Dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mendukung prioritas peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui fokus pada upaya sebagai berikut:
- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan melalui upaya:

- 1) peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
 - 2) penerapan merit system dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
 - 3) optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
 - 4) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta
 - 5) optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif, dilakukan melalui upaya:
- 1) peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - 2) peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta kesehatan ibu dan anak;
 - 3) peningkatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka pencapaian SPM Kesehatan;
 - 4) peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan;
 - 5) dukungan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yaitu Wajib Belajar 13 Tahun pada 1 tahun usia pra sekolah serta pendidikan kesetaraan dengan fokus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar sebagai ujung tombak penanganan anak tidak sekolah;
 - 6) peningkatan kualitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan;
 - 7) penguatan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti; serta
 - 8) peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.
- c. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui upaya:
- 1) pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
 - 2) peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;
 - 3) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
 - 4) pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat:

- 5) peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;
 - 6) peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - 7) peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan;
 - 8) peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan; serta
 - 9) peningkatan perlindungan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal.
- d. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui upaya:
- 1) pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
 - 2) optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;
 - 3) pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
 - 4) peningkatan Upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan
 - 5) penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat, dilakukan melalui upaya:
- 1) penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;
 - 2) peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;
 - 3) penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan
 - 4) pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka peningkatan optimalisasi nilai-nilai budaya masyarakat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2025. Selanjutnya dukungan program prioritas (termasuk target dan pagu indikatifnya) terhadap Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2025. Secara lengkap keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025 tersaji pada Tabel III.1. berikut ini.

Tabel III.1.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen
Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Prioritas 1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Prioritas 4 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan
Prioritas 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Prioritas 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
Prioritas 3 Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Prioritas 1 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Prioritas 4 Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Prioritas 1 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Prioritas 3 Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 5 Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	Prioritas 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Prioritas 4 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru PN 5 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sumber: RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan yang mendukung peningkatan nilai produksi pertanian dan ketahanan pangan tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel. III.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pagan Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten Kebumen
Prioritas 3 Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Prioritas 1 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Sumber Data: RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (data diolah)

Selain itu, Prioritas Nasional Tahun 2025 juga telah selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen dengan indikator dan target pada Tahun 2025 serta Prioritas Daerah Tahun 2025, tentunya juga selaras dengan tujuan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, seperti pada tabel III.3. berikut:

Tabel III.3. Keselarasan Sasaran RPJMD, Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025	Prioritas Daerah	Prioritas nasional
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	6.297,37	Prioritas 3 Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
2	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	13,90-14,71**	Prioritas 3 Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru

Sumber Data RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (Data diolah)
 Keterangan : **target telah disesuaikan dengan IUP pada Tahun 2025 sebagai data baseline RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Keterkaitan juga terjadi antara sasaran hingga bidang/program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025, keterkaitan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen seperti tercantum dalam tabel III.4. berikut:

Tabel III.4. Keterkaitan Sasaran hingga Bidang/Program dan Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional dan Sasaran Nasional	Target Sasaran Nasional Tahun 2025	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Satuan	Target Tahun 2025	Bidang/Program Daerah Pendukung	Indikator Bidang/Program Daerah Pendukung	Target Tahun 2025	Prioritas Daerah
PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru									
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	7,21%	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	13,90-14,71**	Bidang Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	9,31%**	Prioritas 3 Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Sumber Data RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (Data diolah)

Keterangan : **) target telah disesuaikan dengan IUP pada Tahun 2025 sebagai data baseline RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan ciri khas agraris dimana mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Secara struktur, aktivitas perekonomian juga masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar dalam PDRB, meskipun setiap tahun peranannya semakin menurun yang artinya mulai terjadi pergeseran baik ke sektor sekunder maupun tersier.

Untuk memajukan sektor pertanian strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agrobisnis merupakan upaya sistemik yang ampuh untuk mencapai tujuan dalam menarik dan mendorong sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien, dan fleksibel, menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pembagian pendapatan selain itu dalam rangka peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani maka sistem dan usaha agrobisnis berlandaskan kerakyatan dengan keterlibatan masyarakat, berlandaskan sumber daya yang ada baik sumber daya alam, teknologi, kearifan lokal, budaya lokal dan menjadikan masyarakat menjadi pelaku utama agribisnis untuk. Pengembangan agrobisnis dapat diukur dengan tingkat diversifikasi usaha ke arah penerimaan ekonomis yang lebih baik. Langkah diversifikasi usaha tidak dapat berjalan mulus apabila pendapatan petani masih rendah. Petani memerlukan tambahan modal kerja dan investasi untuk adopsi teknologi baru, akses informasi, intensitas tenaga kerja proses produksi, manajemen pengolahan, pemasaran, dan pasca panen, baik secara individual maupun secara kelompok.

Strategi dan prioritas pembangunan tahun 2025 adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pertanian, modernisasi sistem pertanian, kelembagaan, dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Kebijakan sektor pertanian yang mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, antara lain:

1. Program Petani Milenial

Salah satu kendala yang kadang dihadapi sektor pertanian adalah keterbatasan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mayoritas petani di Kebumen berusia diatas 40 th, ini berdampak kinerja petani tidak maksimal dan penguasaan teknologi dan inovasi teknologi pertanian sangat sulit di adopsi. Petani cenderung melaksanakan kegiatan pertanian secara konvensional dengan melaksanakan apa yang telah mereka jalankan beberapa tahun yang lalu. Diversifikasi tanaman yang

bernilai tinggi di Kebumen telah dilakukan oleh beberapa petani, namun secara makro capaiannya di Kebumen masih sangat kecil.

Kebutuhan pangan dan bertambahnya penduduk, dinamisnya permasalahan di sektor pertanian serta menyempitnya lahan pertanian menuntut petani dapat meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan teknologi informasi yang berujung pada modernisasi sektor pertanian, berhubungan dengan hal tersebut dibutuhkan petani muda yang menguasai teknologi sebagai generasi penerus di sektor pertanian.,

Dengan kendala dan permasalahan yang ada maka penguatan kapasitas kelembagaan teknis dan kelembagaan petani sangat diperlukan, salah satu tujuan peningkatan kapasitas kelembagaan petani yaitu untuk meningkatkan skala dan efisiensi usaha serta posisi tawar petani. Sehingga usaha tani berjalan optimal yang ujungnya kesejahteraan petani juga akan meningkat. Peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan pertanian dengan memberdayakan masyarakat petani melalui kegiatan petani milenial, pendidikan, pelatihan dalam mendapatkan akses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran hasil.

Pemberdayaan petani dan kelembagaan dimaksudkan agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi secara terus-menerus, bukan hanya perubahan teknologi baru yang sesuai, namun juga perlu ada inovasi kelembagaan ekonomi petani.

2. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan/ atau korporasi

Tidak berkembangnya suatu wilayah pertanian biasanya disebabkan rendahnya aktivitas produksi (barang dan jasa) dan terbatasnya infrastruktur. Kondisi yang menjadi faktor penghambat adalah masih lemahnya struktur ekonomi, keterbatasan akses ke pemasaran hasil dan sumber modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian, disparitas antar wilayah yang tidak seimbang, petani berskala gurem dan miskin, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung, petani skala kecil, konversi lahan dan berkulat on-farm. Dari sektor pertanian pangan permasalahan yang dialami petani yaitu terjadinya alih fungsi lahan, terbatasnya penyediaan benih secara tepat spesifik lokasi, penguasaan teknologi usahatani dan ketrampilan petani belum optimal, adanya ketergantungan terhadap pasar input dan output, keterbatasan petani terhadap akses permodalan, dan kepemilikan aset yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan dan kesejahteraan petani belum memadai.

Masalah-masalah tersebut menyebabkan upaya peningkatan efisiensi melalui pencapaian skala usaha ekonomis (economic of scale) sulit dicapai. Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi (Corporate farming) adalah suatu pengelolaan pembangunan wilayah sentra-sentra produksi dalam skala ekonomi serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi serta nilai tambah dan daya saing wilayah untuk keberlanjutan usahatani. Keputusan Menteri Pertanian No. 472/2018, setiap program dan kegiatan harus landed di kawasan pertanian dengan komoditas prioritas pangan (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu), hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, pisang, manggis, mangga dan durian), perkebunan (tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, cengkeh, pala, lada, kelapa sawit, karet dan kelapa). Maupun peternakan (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, itik, ayam buras dan babi). Pendekatan wilayah merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, agroekosistem, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

Pendekatan kesisteman adalah keterpaduan usahatani padi mulai dari industri hulu-hilir dalam suatu sistem agribisnis. Artinya bahwa kegiatan yang akan dilakukan merupakan satu kesatuan sistem yang terkait mulai dari pengadaan input, usahatani, pasca panen dan prosesing yang mengacu pada sistem produksi berkelanjutan, serta kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan sampai ke konsumen akhir.

3. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Ketahanan pangan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa. Cadangan pangan bagi masyarakat di suatu daerah dikuasai oleh pemerintah, pedagang/swasta dan rumah tangga yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan bagi suatu daerah untuk memastikan keterjangkauan, ketersediaan dan kermanfaatan pangan dapat dilakukan.

Kedaulatan pangan akan dicapai kalau produksi di suatu daerah melebihi dari kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten

Kebumen yang merupakan daerah dengan pola tanam rata-rata 2 kali setahun dan jumlah panen yang dihasilkan melebihi dari jumlah kebutuhan masyarakat. Namun dengan pola panen yang rata-rata 2 kali diperlukan mekanisme untuk dapat menyimpan hasil pertanian yang dapat dipergunakan pada waktu tidak/belum panen. Lumbung pangan masyarakat merupakan salah satu alternatif untuk dapat menstabilkan harga pangan di masa-masa terjadi kerawanan pangan (bencana alam, gangguan produksi, bencana non alam). Pola LSM ini dengan menyimpan sebagian hasil panen dari masyarakat/kelompok masyarakat kedalam lumbung atau tempat tertentu yang akan dipergunakan pada waktu dibutuhkan.

4. Pengembangan produk olahan pertanian

Poverty Alleviation Initiative (1996) mengemukakan unsur-unsur pendukung agribisnis dari rumusan agribisnis oleh Srivastava (1990). Unsur-unsur tersebut dirinci menjadi klaster-klaster agribisnis yang saling terkait. Agrobisnis berawal dan berakhir dalam bentuk agroindustri yaitu agroindustri prapanen dan pascapanen. Simatupang (1989) menyebut keterkaitan dengan agroindustri prapanen sebagai backward linkages, dan yang dengan agroindustri pascapanen sebagai forward linkages. Forward linkage adalah kegiatan dimana sektor unggulan tersebut mampu mendorong sektor lain supaya lebih berkembang. Sedangkan backward linkage adalah kegiatan sektor unggulan yang membutuhkan sektor lain untuk kelancaran kegiatannya. Jika industri sarana produksi pertanian (industri prapanen) mampu menyediakan input (saprotan) yang diperlukan dalam memproduksi seperti pupuk, benih/bibit, pestisida, dan sebagainya, maka backward linkages berfungsi. Bila hasil pertanian, sebagai bahan baku agroindustri mampu memenuhi kebutuhan industri, maka forward linkages berfungsi. Pengembangan agroindustri berbahan baku produk pertanian merupakan perwujudan dari forward linkage.

Pengembangan agroindustri yang merupakan bagian dari rantai agribisnis akan dicapai nilai tambah yang berdampak positif terhadap penerimaan dan pendapatan petani yang mengadopsinya. Disisi lain, agroindustri merupakan usaha meningkatkan efisiensi sektor pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui proses modernisasi pertanian. melalui modernisasi disektor agroindustri, penerimaan nilai tambah petani dapat ditingkatkan sehingga pendapatan petani akan lebih besar lagi. Jenis industri pertanian yang dapat dikembangkan di pedesaan memiliki peluang yang besar, maka

perlu diprioritaskan pertumbuhan agroindustri yang mampu menangkap efek ganda yang tinggi bagi pembangunan ekonomi daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan social, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor- sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah

meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
- Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia’.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Pengautan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen adalah mendukung dan menyukseskan misi ke-3 (tiga). Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang bersesuaian dengan setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, yaitu:

1. meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer dengan indikator PDRB ADHK Sektor Primer, dan
2. Berkurangnya penduduk miskin dengan indikator tingkat kemiskinan.

Upaya mencapai tujuan tersebut didukung melalui 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya nilai produksi pertanian dan
2. Meningkatnya ketahanan pangan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, memiliki indikator dengan target capaian yang telah ditentukan, sebagai tolok ukur capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan, target tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel III.5 berikut ini.

Tabel III.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
					2025
1	Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	Milyar rupiah	6.297,37
		Meningkatnya nilai produksi pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	5,00
2	Berkurangnya penduduk miskin		Tingkat Kemiskinan	%	13,50 -14,00
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	5,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045 dalam mencapai sasaran pokok arah pembangunan dalam hal mewujudkan ketahanan pangan yang lebih terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman, maka pada sasaran pokok ini terdapat 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yaitu Indeks ketahanan pangan & Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Berikut nilai IKP dan PoU tahun 2023 dan proyeksi baseline tahun 2025.

Tabel III.6. Capaian Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Mencapai Sasaran Pokok Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2023 (%)	Proyeksi Baseline Tahun 2025 (%)
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,34	80,86
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i> /PoU)	12	9,31

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) meningkat menjadi 80,34 persen (tahun 2023) yang sebelumnya 73,72 persen (tahun 2018). Hal ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah, mutu, keamanan, pemerataan, dan keterjangkauan.

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan membaik semula 13,82 persen (tahun 2017) menjadi 12,00 persen (tahun 2023), Dengan semakin

kecilnya prevalensi ketidakcukupan pangan menunjukkan adanya peningkatan mutu konsumsi makanan masyarakat Kebumen yaitu semakin memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan tubuh atau ideal secara kandungan nutrisi dan akan berpengaruh pada penanggulangan stunting

Dalam mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ketahanan pangan yang lebih terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman serta mendukung kebijakan kemandirian pangan dengan melakukan arah kebijakan berupa :

1. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan
2. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan
3. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*)
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Perubahan rencana program Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Perumusan perubahan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah.

Perubahan Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, dijabarkan dalam 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah, 4 (empat) program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 6 (enam) program urusan pemerintahan pilihan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan ada 4 (empat) program. Program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pangan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan ,melaksanakan kegiatan:
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

Program urusan pemerintahan pilihan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ada 6 (enam) program. Program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;
 - e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian;
 - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.
 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota,
 5. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.
 6. Program Penyuluhan Pertanian, dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 merupakan penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan upaya mensinergikan program dan kegiatan dengan dinamika masa transisi kepala daerah melalui penyelarasan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penyusunan. Perubahan Renja mendasari pada perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 mendasari evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 minimal sampai dengan triwulan I Tahun 2025 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan APBD Murni Tahun 2025 beserta seluruh perubahan penjabarannya. Situasi perekonomian serta kebijakan pemerintah pusat saat ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan kerangka pendapatan daerah, baik yang bersumber dari faktor internal khususnya pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, maupun faktor eksternal yaitu pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Hal ini memerlukan penyesuaian terhadap belanja, pendapatan dan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan Rencana Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja memuat pergeseran, pengurangan dan penambahan anggaran dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah. Perubahan rencana program dan kegiatan tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

4.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan

I. Urusan Pangan

Dalam menjalankan urusan pangan, Dinas Pertanian dan Pangan didukung dengan 4 program, yaitu

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Mangan Wareg Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan.

- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota fokus pada pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan V-10

perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi masyarakat. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong serta Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase diversifikasi dan ketahanan pangan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/ Kota melalui penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa yang tertangani kerawanan pangannya.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada pemberian jaminan keamanan bagi konsumen untuk penggunaan produk olahan dan barang pangan yang dijual dipasaran dengan kualitas tinggi melalui pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan penguatan kelembagaan keamanan pangan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

II. Urusan Pertanian

Dalam menjalankan urusan Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan didukung melalui 6 program yaitu

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian melalui pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota dengan upaya peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan melalui pengawasan mutu benih/bibit ternak dengan pendampingan peningkatan kualitas gizi pakan ternak. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer dan pengendalian pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan yang fokus pada peningkatan kualitas bibit ternak sapi PO. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Selain itu terkait peternakan juga mendukung PSN Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada pengembangan prasarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya. Pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, DAM parit, dan jalan usaha tani, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya, dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota melalui pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak serta pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak. Selain itu terkait pengelolaan dan pemanfaatan irigasi juga mendukung PSN Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota dengan fokus pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota fokus pada penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan dan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan focus pada penyediaan jasa medik veteriner, pendampingan usaha produk hewan, uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan pendampingan penerapan kesejahteraan hewan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penurunan kejadian dan kasus penyakit hewan menular.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan fokus pada pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Namun demikian capaian indikatornya masih sangat rendah, untuk itu terdapat prioritas upaya yang dilakukan diantaranya dengan optimalisasi peran aktif penyuluh pertanian dalam mengedukasi para petani mengenai praktik pertanian yang baik untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit, termasuk rotasi tanaman dan kebersihan lahan, membangun sistem pemantauan dini berbasis teknologi untuk mendeteksi gejala awal hama

dan penyakit pada tanaman atau hewan sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih cepat, mendorong penggunaan biopestisida yang ramah lingkungan dan mengurangi risiko dampak negatif terhadap ekosistem dibandingkan pestisida kimia.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini difokuskan pada penerbitan izin usaha pertanian dan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi izin usaha pertanian.

f. Program Penyuluh Pertanian

Program ini difokuskan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, pembentukan badan usaha milik petani, pembentukan

dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani serta pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur

dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sektor evaluasi kinerja penyuluhan pertanian

Guna mendukung tercapainya dan keberhasilan program serta indikator kinerja program diperlukan dukungan anggaran. Adapun kerangka pendanaan secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan pada RKPD Murni, APBD Murni, dan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Prioritas/Bidang/Urusan/program/Kegiatan	RKPD Murni Tahun 2025 (Rp)	APBD Murni Tahun 2025 (Rp)	RKPD Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
I	PRIORITAS 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	54.518.394.376	33.180.799.850	39.230.660.200	
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	21.905.170.126	21.455.057.000	20.167.964.000	Dinas Pertanian dan Pangan
1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	76.804.000	62.804.000	45.564.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	38.963.000	38.963.000	38.960.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	532.361.000	501.093.000	457.289.000	Dinas Pertanian dan Pangan
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.257.042.126	20.852.197.000	19.626.151.000	Dinas Pertanian dan Pangan
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.613.224.250	11.725.742.850	19.062.696.200	Dinas Pertanian dan Pangan
1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	449.767.000	449.767.000	375.648.000	Dinas Pertanian dan Pangan

No	Prioritas/Bidang/Urusan/program/Kegiatan	RKPD Murni Tahun 2025 (Rp)	APBD Murni Tahun 2025 (Rp)	RKPD Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.165.456.000	1.114.592.000	1.063.854.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	24.627.969.000	6.985.295.600	13.864.647.700	Dinas Pertanian dan Pangan
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.786.795.250	1.636.699.250	1.776.770.500	Dinas Pertanian dan Pangan
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.543.237.000	1.499.389.000	1.952.596.000	Dinas Pertanian dan Pangan
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	40.000.000	40.000.000	29.180.000	Dinas Pertanian dan Pangan

4.2. Rencana Pendanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara integratif dan melibatkan multistockholder dan multistakeholder. Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, pendanaan merupakan komponen kunci dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan inklusif. Selain itu, diperlukan strategi pendanaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Namun demikian, menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat selama penyusunan APBD Tahun 2025, dinamika pelaksanaan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I serta kemampuan keuangan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2025 maka terdapat perubahan rencana pendanaan pengentasan kemiskinan ekstrem Tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Pendanaan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

No	Nama OPD	Nama Sub Kegiatan	Strategi	RKPD Murni TA 2025	APBD Murni TA 2025 (Rp)	RKPD PERBUB TA 2025 (Rp)
1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	257.410.000	231.778.000	242.379.000
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	176.000.000	136.000.000	101.449.000
3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	156.351.000	156.351.000	126.420.000
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	77.534.000	46.334.000	40.202.000
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	318.388.000	318.388.000	220.112.000

No	Nama OPD	Nama Sub Kegiatan	Strategi	RKPD Murni TA 2025	APBD Murni TA 2025 (Rp)	RKPD PERBUB TA 2025 (Rp)
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	336.327.000	336.327.000	274.002.000
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	250.000.000	50.000.000	133.237.000
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	673.715.000	650.359.000	672.597.000
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	8.006.487.000	706.000.000	697.663.000
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	7.017.417.000	650.359.000	6.538.340.000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	10.971.000	10.971.000	7.473.000

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

